

Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Kodam XVII/Cenderawasih

Rudityana Danang Priatomo^{a,1,*}, Ali Rahman Reza Zaputra^{b,2}, Marlina^{c,3}

^aProgram Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Achmad Yani

^bProgram Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Achmad Yani;

^cProgram Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Achmad Yani);

¹ danangpriatomo@gmail.com ; ² ali.rahman@lecture.unjani.ac.id ; ³ mar.lina@lecture.unjani.ac.id ;

*Correspondent Author; Email Author

ARTICLE INFO

Article history

Received:

30-05-2026

Revised:

14-06-2026

Accepted:

07-07-2026

Keywords

Standar Akuntansi

Pemerintahan;

pengendalian internal;

akuntabilitas keuangan

negara; PLS-SEM; satuan

kerja militer

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pada satuan kerja di lingkungan Kodam XVII/Cenderawasih, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan metode survei melalui kuesioner skala Likert 1–5 yang disebarakan kepada 50 responden aparatur pengelola keuangan yang dipilih secara purposive sampling. Data dianalisis menggunakan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS, meliputi evaluasi model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model), serta pengujian hipotesis melalui teknik bootstrapping. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh indikator penelitian valid dan reliabel. Pemahaman SAP terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (koefisien jalur 0,535; T-statistik 8,152; p 0,000), demikian pula pengendalian internal (koefisien jalur 0,553; T-statistik 8,402; p 0,000). Kedua variabel secara simultan mampu menjelaskan 77,6% variasi akuntabilitas pengelolaan keuangan negara ($R^2 = 0,776$). Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kompetensi aparatur dalam memahami SAP berbasis akrual serta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan dua faktor kunci yang saling melengkapi dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan yang optimal, termasuk pada organisasi militer yang memiliki karakteristik komando dan kompleksitas anggaran khusus.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Pendahuluan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan pilar utama penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada prinsip good governance, menuntut setiap entitas pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik secara transparan, efisien, efektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan (Mardiasmo, 2020).

Pemerintah Indonesia secara berkelanjutan menyempurnakan regulasi dan standar akuntansi guna meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan, salah satunya melalui kewajiban penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Meskipun demikian, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh banyak entitas pemerintah belum sepenuhnya mencerminkan akuntabilitas yang optimal, karena masih ditemukan kelemahan mendasar pada sistem pengendalian internal dan ketidaksesuaian penerapan SAP (Tauhid, Kusuma, & Melani, 2023; Putra, Rivandi, & Zulvia, 2024). Kesenjangan ini juga berpotensi terjadi pada satuan kerja di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), termasuk Kodam XVII/Cenderawasih, yang memiliki karakteristik struktur komando yang kuat, kompleksitas pengelolaan anggaran, kondisi geografis wilayah Indonesia Timur yang luas, serta keterbatasan infrastruktur dan variasi kompetensi sumber daya manusia antarsatuan kerja.

Pemahaman SAP merupakan faktor penting karena aparatur yang memahami prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi keuangan berbasis akrual akan mampu menyusun laporan keuangan secara tepat, sehingga menekan risiko kesalahan pencatatan dan ketidaktepatan klasifikasi akun (Asnida, Irwansyah, & Aprila, 2021; Udin, Yusra, Satria, & Putri, 2024). Di sisi lain, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang mengadopsi kerangka lima komponen COSO – lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan – berperan meminimalkan risiko penyimpangan dan memastikan proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan (COSO, 2013; Putra et al., 2024). Penelitian ini menggunakan Stewardship Theory sebagai grand theory, yang memandang aparatur pengelola keuangan sebagai steward yang dipercaya bertindak demi kepentingan organisasi dan pemilik sumber daya publik, sehingga pemahaman SAP dan pengendalian internal menjadi dua instrumen utama yang mendukung peran stewardship tersebut dalam mewujudkan akuntabilitas (Davis, Schoorman, & Donaldson, 1997).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh pemahaman SAP dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga sipil (Rohmah, Askandar, & Sari, 2020; Muliani & Usman, 2023; Harun, 2021; Yanti, Ferawati, & Khairiyani, 2022; Mamahit, 2022; Ramayoni, 2021; Mukaromah & Ari, 2021; Inuzula & Bustami, 2021), namun penelitian empiris yang secara khusus mengkaji konteks organisasi militer, dengan struktur, budaya, dan karakteristik pengelolaan keuangan yang berbeda dari instansi sipil, masih terbatas. Kesenjangan penelitian (research gap) inilah yang mendasari urgensi penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh pemahaman SAP terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara; (2) menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara; (3) menganalisis pengaruh simultan kedua variabel tersebut; dan (4) mengetahui besarnya kontribusi kedua variabel dalam menjelaskan variasi akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pada satuan kerja di lingkungan Kodam XVII/Cenderawasih. Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, dirumuskan tiga hipotesis: H1, pemahaman SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara; H2, pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara; dan H3, pemahaman SAP dan pengendalian internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. (Using Book Antiqua 11, single spacing).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksplanatori untuk menjelaskan hubungan kausal antarvariabel melalui pengujian hipotesis. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert 1–5 (Sangat Tidak Setuju–Sangat Setuju), yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel: pemahaman SAP (X1: pemahaman basis akrual, pengakuan, pengukuran, penyajian laporan keuangan, dan penerapan dalam praktik kerja), pengendalian internal (X2: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan), dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Y: kepatuhan terhadap peraturan, keandalan dan ketepatan laporan keuangan, transparansi, tindak lanjut hasil audit, serta efektivitas penggunaan anggaran). Populasi penelitian adalah seluruh aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara pada satuan kerja di lingkungan Kodam XVII/Cenderawasih, dengan sampel sebanyak 50 responden yang ditentukan melalui teknik purposive sampling berdasarkan kriteria: terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan, memahami/menggunakan SAP dalam pekerjaannya, dan memiliki pengalaman kerja minimal satu tahun. Data dianalisis menggunakan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS, karena metode ini mampu menganalisis hubungan antarvariabel laten secara simultan, tidak mensyaratkan distribusi data normal, dan sesuai untuk penelitian dengan jumlah sampel terbatas. Tahapan analisis meliputi evaluasi model pengukuran (outer model) melalui uji validitas konvergen, validitas diskriminan (Fornell-Larcker), dan reliabilitas komposit (Cronbach's Alpha dan Composite Reliability $\geq 0,70$; AVE $\geq 0,50$); serta evaluasi model struktural (inner model) melalui uji kelayakan model (goodness of fit), koefisien determinasi (R^2), dan pengujian hipotesis dengan teknik bootstrapping 500 subsampel, di mana hipotesis diterima apabila T-statistik $> 1,96$ dan p-value $< 0,05$.

Hasil dan Pembahasan

1. Karakteristik Responden

Identitas Responden	Klasifikasi	Frekuensi	Persentase
Pangkat	Kopda	1	2,0%
	Serda	10	20,0%
	Serda (K)	1	2,0%
	Sertu	7	14,0%
	Serka	3	6,0%
	Serka (K)	1	2,0%
	Letda Cku	5	10,0%

Identitas Responden	Klasifikasi	Frekuensi	Persentase
	Letda Cku (K)	1	2,0%
	Lettu Cku	4	8,0%
	Kapten Cku	6	12,0%
	Kapten Cku (K)	1	2,0%
	Mayor Cku	2	4,0%
	Lekol Cku	1	2,0%
	Kolonel Cku	1	2,0%
	III/A	5	10,0%
	III/B	1	2,0%
Total		50	100%

Kuesioner disebarakan kepada 50 responden aparatur pengelola keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kodam XVII/Cenderawasih. Berdasarkan pangkat, responden didominasi oleh Serda (20,0%), diikuti Sertu (14,0%), Kapten Cku (12,0%), serta Letda Cku dan golongan PNS III/A masing-masing (10,0%), dengan sisanya tersebar pada berbagai tingkat kepangkatan mulai dari tamtama hingga perwira menengah. Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden adalah laki-laki (80,0%) dan perempuan (20,0%), sejalan dengan karakteristik umum institusi TNI. Berdasarkan kelompok umur, responden terbanyak berada pada rentang 20–30 tahun (42,0%), diikuti 31–40 tahun dan 41–50 tahun (masing-masing 22,0%), serta 51–60 tahun (14,0%). Secara deskriptif, tingkat capaian responden terhadap variabel pemahaman SAP sebesar 79,36%, pengendalian internal sebesar 79,12%, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sebesar 79,44% dari skor kriterium ideal..

2. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Evaluasi outer model dilakukan melalui tiga pengujian, yaitu: uji validitas konvergen (convergent validity), uji validitas diskriminan (discriminant validity), dan uji reliabilitas komposit (composite reliability).

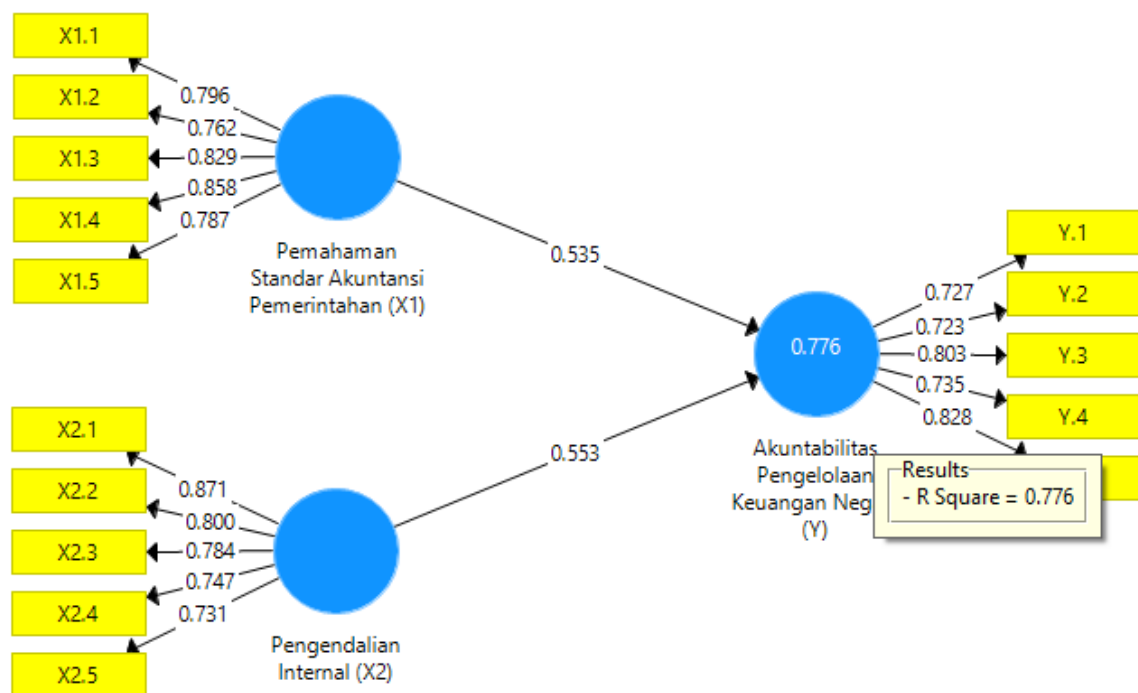


Fig. 1. . Gambar 1 Outer Model

a. Convergent Validity (Validitas Konvergen)

Validitas konvergen dinilai berdasarkan nilai loading factor setiap indikator terhadap variabel latennya. Suatu indikator dinyatakan valid secara konvergen apabila memiliki nilai loading factor $\geq 0,70$ (Hair et al., 2019). Hasil pengujian disajikan pada Tabel 2 berikut..

Tabel 2 Hasil Uji Convergent Validitas

Variabel	Indikator	Loading Factor	Rule of Thumb	Kesimpulan
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	X1.1	0.796	0.7	Valid
	X1.2	0.762	0.7	Valid
	X1.3	0.829	0.7	Valid
	X1.4	0.858	0.7	Valid
	X1.5	0.787	0.7	Valid
Pengendalian Internal (X2)	X2.1	0.871	0.7	Valid
	X2.2	0.800	0.7	Valid
	X2.3	0.784	0.7	Valid
	X2.4	0.747	0.7	Valid
	X2.5	0.731	0.7	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara (Y)	Y.1	0.727	0.7	Valid
	Y.2	0.723	0.7	Valid
	Y.3	0.803	0.7	Valid
	Y.4	0.735	0.7	Valid

	Y.5	0.828	0.7	Valid
--	-----	-------	-----	-------

Sumber: Output SmartPLS 3.0 (data diolah, 2026)

Berdasarkan Tabel 2 seluruh indikator dari ketiga variabel penelitian memiliki nilai loading factor di atas 0,70, sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen. Variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) memiliki nilai loading factor berkisar antara 0,762 hingga 0,858. Nilai tertinggi diperoleh pada indikator X1.4 (0,858), yang mencerminkan bahwa indikator tersebut merupakan refleksi terkuat dari variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan. Variabel Pengendalian Internal (X2) memiliki nilai loading factor berkisar antara 0,731 hingga 0,871, dengan indikator X2.1 sebagai indikator paling dominan (0,871). Adapun variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara (Y) memiliki nilai loading factor antara 0,723 hingga 0,828, dengan indikator Y.5 sebagai yang tertinggi (0,828). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dalam penelitian ini dinyatakan valid secara konvergen.

b. Discriminant Validity (Validitas Diskriminan)

Validitas diskriminan diuji menggunakan metode Fornell-Larcker Criterion, yaitu dengan membandingkan nilai akar kuadrat AVE (Average Variance Extracted) setiap konstruk dengan korelasi antar konstruk. Suatu konstruk dinyatakan memiliki validitas diskriminan yang baik apabila nilai akar kuadrat AVE-nya lebih besar dari korelasi konstruk tersebut dengan konstruk lainnya (Fornell & Larcker, 1981).

Tabel 3 Hasil Uji Discriminant Validity (Fornell-Larcker Criterion)

Variabel	Akuntabilitas PKN (Y)	Pemahaman SAP (X1)	Pengendalian Internal (X2)
Akuntabilitas PKN (Y)	0.764		
Pemahaman SAP (X1)	0.707	0.807	
Pengendalian Internal (X2)	0.719	0.311	0.788

Catatan: Nilai diagonal (dicetak tebal) merupakan akar kuadrat AVE.

Sumber: Output SmartPLS 3.0 (data diolah, 2026)

Berdasarkan Tabel 3, nilai akar kuadrat AVE untuk setiap variabel lebih besar dibandingkan nilai korelasi dengan variabel lainnya. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara (Y) memiliki akar kuadrat AVE sebesar 0,764 yang lebih besar dari korelasinya dengan X1 (0,707) maupun X2 (0,719). Variabel X1 memiliki akar kuadrat AVE sebesar 0,807 yang jauh lebih besar dari korelasinya dengan X2 (0,311). Variabel X2 memiliki akar kuadrat AVE sebesar 0,788. Dengan demikian, seluruh variabel dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas diskriminan, artinya setiap konstruk mengukur konsep yang berbeda dan unik.

c. Composite Reliability dan Average Variance Extracted (AVE)

Reliabilitas konstruk dievaluasi menggunakan nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability. Suatu konstruk dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha $\geq 0,70$ dan Composite Reliability $\geq 0,70$. Selain itu, nilai AVE $\geq 0,50$ juga dipersyaratkan sebagai konfirmasi validitas konvergen (Fornell & Larcker, 1981).

Tabel 4 Hasil Uji Composite Reliability dan AVE

Variabel	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	AVE
Akuntabilitas PKN (Y)	0.821	0.824	0.875	0.584
Pemahaman SAP (X1)	0.866	0.869	0.903	0.651
Pengendalian Internal (X2)	0.847	0.871	0.891	0.621

Sumber: Output SmartPLS 3.0 (data diolah, 2026)

Berdasarkan Tabel 4, seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability yang melebihi batas minimum 0,70, sehingga dapat dinyatakan reliabel. Variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) memiliki Cronbach's Alpha 0,866 dan Composite Reliability 0,903 – nilai tertinggi di antara ketiga variabel. Variabel Pengendalian Internal (X2) memiliki Cronbach's Alpha 0,847 dan Composite Reliability 0,891, sedangkan variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara (Y) memiliki Cronbach's Alpha 0,821 dan Composite Reliability 0,875.

Nilai AVE seluruh variabel juga melebihi 0,50, yaitu Y sebesar 0,584, X1 sebesar 0,651, dan X2 sebesar 0,621. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih dari 50% varians pada setiap konstruk dapat dijelaskan oleh indikator-indikatornya, sehingga validitas konvergen terkonfirmasi dengan baik.

3. Evaluasi Inner Model (Model Struktural)

Evaluasi inner model dilakukan untuk menilai kekuatan hubungan antar variabel laten dalam model struktural. Penilaian dilakukan melalui uji goodness of fit model, nilai R Square (R^2), dan uji hipotesis.

a. Goodness of Fit Model

Kelayakan model struktural dievaluasi menggunakan beberapa indikator fit, sebagaimana disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5 Hasil Uji Model Fit

Indikator	Nilai	Saturated Model
d_ULS	1.089	1.089
d_G	0.613	0.613
Chi-Square	137.616	137.616
NFI (Normed Fit Index)	0.707	0.707

Sumber: Output SmartPLS 3.0 (data diolah, 2026)

Berdasarkan Tabel 5, nilai NFI (Normed Fit Index) diperoleh sebesar 0,707. Nilai NFI yang mendekati atau melebihi 0,70 mengindikasikan bahwa model memiliki tingkat kesesuaian yang dapat diterima (Henseler et al., 2014). Dengan demikian, model struktural dalam penelitian ini dinyatakan fit dan layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis.

b. Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi varians variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model. Hasil pengujian R Square disajikan pada Tabel 4.8 berikut.

Tabel 6 Hasil Uji R Square

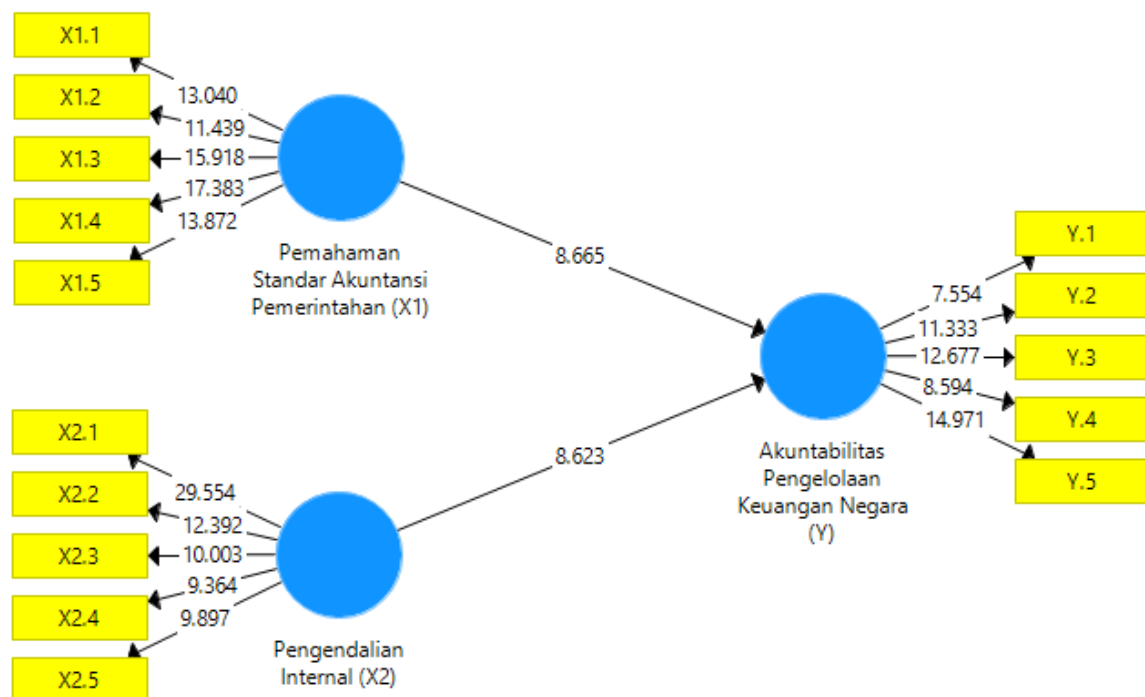
Variabel	R Square	R Square Adjusted
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara (Y)	0.776	0.766

Sumber: Output SmartPLS 3.0 (data diolah, 2026)

Berdasarkan Tabel 6, nilai R Square variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara (Y) sebesar 0,776, yang berarti bahwa 77,6% variasi pada akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat dijelaskan oleh variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) dan Pengendalian Internal (X2), sedangkan sisanya sebesar 22,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Nilai R Square Adjusted sebesar 0,766 mengonfirmasi bahwa penjelasan model ini tetap kuat bahkan setelah memperhitungkan jumlah prediktor. Mengacu pada kriteria Cohen (1988), nilai $R^2 \geq 0,67$ dikategorikan sebagai substansial, sehingga model penelitian ini memiliki daya prediksi yang tinggi.

c. Uji Hipotesis (Pengaruh Langsung)

Gambar 2 Outer Model



Pengujian hipotesis dilakukan melalui teknik bootstrapping dengan 500 subsamples untuk memperoleh nilai T-Statistik dan P-Value. Hipotesis diterima apabila T-Statistik $> 1,96$ dan P-Value $< 0,05$ (pada tingkat signifikansi 5%). Hasil pengujian disajikan pada Tabel 4.9 berikut.

Tabel 7 Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Langsung

Hubungan	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Std. Deviation	T Statistics	P Values
Pemahaman SAP (X1) -> Akuntabilitas PKN (Y)	0.535	0.536	0.066	8.152	0.000
Pengendalian Internal (X2) -> Akuntabilitas PKN (Y)	0.553	0.558	0.066	8.402	0.000

Sumber: Output SmartPLS 3.0 (data diolah, 2024)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 7 diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Hipotesis 1: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara (Y) dengan nilai Original Sample sebesar 0,535, T-Statistik sebesar 8,152 ($> 1,96$), dan P-Value sebesar 0,000 ($< 0,05$). Dengan demikian, hipotesis pertama diterima.
2. Hipotesis 2: Pengendalian Internal (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara (Y) dengan nilai Original Sample sebesar 0,553, T-Statistik sebesar 8,402 ($> 1,96$), dan P-Value sebesar 0,000 ($< 0,05$). Dengan demikian, hipotesis kedua diterima.

4. Pembahasan

Pengaruh positif pemahaman SAP terhadap akuntabilitas menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman aparatur terhadap prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010, semakin tinggi pula tingkat pertanggungjawaban keuangan yang dihasilkan, sehingga informasi keuangan dapat diandalkan oleh BPK, DPRD, maupun masyarakat. Temuan ini konsisten dengan penelitian Udin et al. (2023), Yanti et al. (2022), dan Inuzula dan Bustami (2021) yang menemukan hubungan positif antara pemahaman SAP dan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Pengendalian internal menunjukkan koefisien jalur yang sedikit lebih tinggi dibandingkan pemahaman SAP, mengindikasikan bahwa efektivitas kelima komponen SPIP – lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan – merupakan prediktor yang sangat kuat, bahkan sedikit lebih dominan, terhadap akuntabilitas. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rohmah et al. (2020), Muliani dan Usman (2023), serta Putra et al. (2024) yang membuktikan bahwa pengendalian internal yang kuat menekan risiko penyimpangan dan meningkatkan keandalan pelaporan keuangan.

Secara simultan, kedua variabel saling melengkapi: pemahaman SAP memberikan fondasi kompetensi teknis, sedangkan pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang menjamin kepatuhan terhadap prosedur. Dalam konteks organisasi militer seperti Kodam XVII/Cenderawasih, dengan struktur komando yang kuat, kompleksitas anggaran, kondisi geografis Indonesia Timur yang luas, serta variasi kompetensi personel antarsatuan kerja, kombinasi kompetensi teknis dan sistem pengawasan yang kuat menjadi kunci utama terwujudnya akuntabilitas pengelolaan

keuangan negara yang optimal, sejalan dengan perspektif Stewardship Theory yang memandang aparatur sebagai pengelola amanah publik..

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa: (1) pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara; (2) pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara; (3) secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara; dan (4) kedua variabel secara bersama-sama menjelaskan 77,6% variasi akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pada satuan kerja di lingkungan Kodam XVII/Cenderawasih, sementara 22,4% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan SAP berkelanjutan, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui pemisahan tugas dan pengawasan berkala, serta pengembangan budaya organisasi yang berorientasi pada transparansi dan integritas. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti pemanfaatan teknologi informasi (e-accounting) atau komitmen organisasi, serta memperluas cakupan pembandingan pada instansi pemerintah sipil untuk melihat perbedaan dinamika penerapan SAP dan pengendalian internal antarkonteks organisasi..

Daftar Pustaka

- Asnida, A., Irwansyah, I., & Aprila, N. (2021). Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 16(2), 45–58.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). *Internal control-Integrated framework*. COSO.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47.
- Harun, M. I. (2021). Pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(1), 23–35.
- Henseler, J., Dijkstra, T. K., Sarstedt, M., Ringle, C. M., Diamantopoulos, A., Straub, D. W., Ketchen, D. J., Hair, J. F., Hult, G. T. M., & Calantone, R. J. (2014). Common beliefs and reality about PLS: Comments on Rönkkö and Evermann (2013). *Organizational Research Methods*, 17(2), 182–209.
- Inuzula, L., & Bustami, K. (2021). Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 4(2), 101–113.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). (2023). *Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual*. KSAP.
- Mamahit, F. A. (2022). Pengaruh pemahaman SAP, pemanfaatan SIAKD, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(1), 55–67.
- Mardiasmo. (2020). *Akuntansi sektor publik (Edisi Terbaru)*. Andi.
- Mukaromah, L., & Ari, P. (2021). Pengaruh prinsip pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Notifik*, 4(2).
- Muliani, M., & Usman, A. (2023). Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 8(2), 88–100.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Putra, R., Rivandi, M., & Zulvia, Y. (2024). Sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 10(1), 1–14.
- Ramayoni, S. (2021). Pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Daerah*, 6(2), 66–79.
- Rohmah, L., Widodo, A., & Santoso, B. (2020). Pengaruh pemahaman SAP dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Publik*, 5(3), 120–134.

- Tauhid, T., Kusuma, H., & Melani, R. (2023). Pengendalian internal dan penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah. *Jurnal Akuntansi Negara*, 9(2), 77-90.
- Udin, F., Yusra, A., Satria, D., & Putri, R. (2024). Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 11(1), 34-48.
- Udin, F., Yusra, M., Satria, D. I., & Putri, R. G. (2023). Pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 2(3), 316-341.
- Yanti, N., Ferawati, R., & Khairiyani. (2022). Pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2).